

PERAN *GATE KEEPER* DALAM MEMBANGUN JARINGAN TOKOH LINTAS AGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI GRESIK

Gate Keeper Role in Building Network of Interreligious Figures Based Local Wisdom In Gresik

SETYO BOEDI OETOMO

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 69-70,
Bambangkerp, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Faks. 024-
7611386
E-mail: budisetia_70@yahoo.com
Naskah diterima : 31 Januari 2015
Naskah direvisi : 23 Maret – 6 April
2015
Naskah disetujui : 23 Juni 2015

ABSTRACT

The composition of community in Gresik which is initially based on the traditional Islam has changed due to the development of non Muslim community and other Islamic sects. These phenomena might cause conflicts between religious followers. To reduce the potency of religious based conflicts, religious leaders use FKUB and FORMALINA as a communication network between believers. This is a qualitative research that concerns on the relationship patterns and the values within networks. Data was collected using FGD, in-depth interviews and document analysis. By analyzing the communication network between actors founded that the pattern of relationships between religious leader well established because there was the actor who played the gate keeper. The actor is capable of filtering information and liaison among actors in FKUB and in FORMALINA. Gate keeper is very crucial role in building mutual trust among actors interfaith. The religious leaders using local wisdom in establishing communication between religious leaders. The values of local wisdom has become a social character of the group.

Keywords: religious leaders's network, intercultural communication, gate keeper, local wisdom.

ABSTRAK

Komposisi masyarakat Gresik yang awalnya merupakan basis umat Islam tradisional kini telah berubah karena perkembangan masyarakat non Muslim dan penganut paham Islam lainnya. Fenomena ini dapat menyebabkan konflik antarpengikut agama. Untuk mengurangi potensi konflik berbasis agama, tokoh agama menggunakan FKUB dan FORMALINA sebagai jaringan komunikasi antar pemeluk agama. Penelitian ini mengkaji pola hubungan dan nilai-nilai yang berkembang dalam jaringan itu dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan FGD, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dengan menganalisis jaringan komunikasi antaraktor ditemukan bahwa pola hubungan antartokoh terjalin baik karena ada aktor yang berperan sebagai gate keeper. Aktor ini mampu menyaring informasi sekaligus penghubung antaraktor di FKUB dan di FORMALINA. Peran gate keeper sangat penting dalam membangun rasa saling percaya antartokoh lintas agama. Para tokoh agama menggunakan kearifan lokal dalam menjalin komunikasi antartokoh agama. Nilai-nilai kearifan lokal ini telah menjadi karakter sosial kelompok.

Kata kunci: jaringan tokoh agama, komunikasi antarbudaya, gate keeper, kearifan lokal.

PENDAHULUAN

Pluralitas agama di Indonesia merupakan realitas sosial sejak dari awal berdirinya negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Para pendiri bangsa sangat memahami suatu kenyataan sosiologis bahwa bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat multikultur dan di dalamnya ada beberapa kelompok umat dengan agama yang berbeda (plural). Ada kelompok-kelompok minoritas yang hidup bersama kelompok mayoritas yang eksistensinya harus dihormati, diakui dan dipertahankan sebagaimana dicanangkan dalam semboyan bhineka tunggal ika (Latif, 2011: 369).

Pluralitas atau kemajemukan kelompok umat beragama itu menurut Furnival (dalam Latif, 2011: 369) menjadi beban tugas yang teramat berat bagi semua unsur bangsa untuk membangun integrasi. Kemajemukan ini menurut Hayat (2012: 25) berimplikasi pada dua potensi yang kontradiktif sekaligus, yaitu potensi integrasi dan disintegrasi. Potensi disintegrasi ini perlu dikelola agar berubah menjadi potensi integrasi yang positif yang mampu mendukung pembangunan di atas kemajemukan.

Kini sudah saatnya setiap komunitas budaya merevitalisasi kearifan lokalnya sebagai modal sosial (*social capital*) agar terbangun rasa persaudaraan yang kuat antarkelompok umat beragama. Kearifan lokal yang mulai hilang dari jiwa masyarakat pemilik budaya membuat potensi konflik anarkisme agama semakin membesar. Masyarakat tidak memiliki filter kultural yang kuat sebagai pengendali sosial dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka (Abdul Rozaki dalam Jati, 2004: 396). Dekapitalisasi modal sosial dalam kearifan lokal menurut Arya Hadi D (dalam Jati, 2004: 396) sudah sangat akut pada beberapa daerah, seperti hilangnya rasa saling percaya (*trust*) di antara sesama anggota masyarakat, rusaknya jaringan sosial (*social networking*), serta tergerusnya rasa patuh terhadap nilai-nilai sosial (*social values*), norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama. Salman (2012: 155) lebih suka menggunakan istilah restorasi modal sosial untuk membangun integrasi sosial dalam

masyarakat yang berubah.

Pemerintah sangat serius dalam mendorong terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat, salah satunya dengan mengimplemetasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006). Isi peraturan menteri itu antara lain pembentukan lembaga jaringan komunikasi antartokoh agama-agama pada daerah-daerah yang dinamakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Kabupaten Gresik juga telah membentuk kepengurusan FKUB pada tanggal 24 April 2007.

Gresik sebagai daerah pesisiran di Jawa Timur, pada bagian utara merupakan basis Islam tradisional yang kuat sedangkan di bagian selatan berkembangnya kaum urban yang heterogen, dan di bagian barat daya mayoritas penduduk aslinya adalah kaum abangan. Beberapa perselisihan intern dan antaragama di Gresik berhasil dikelola dengan baik oleh Pemda Gresik karena pihak Pemda Gresik selalu memperhatikan rekomendasi FKUB Gresik. Contoh kasusnya lain perselisihan antara MTA di Gresik dengan warga NU Gresik tahun 2013, pendirian pura di Kedamean (2012) dan kasus-kasus pendirian gereja Betani di Driyorejo (FGD dengan Penyuluh Kemenag, 12 Pebruari 2014; Sekretaris FKUB Gresik, w. 11 Pebruari 2014). Feomena tersebut sangat menarik untuk dikaji, potensi apa yang dimiliki FKUB sehingga mampu memberikan sumbangan yang positif terhadap terciptanya harmoni umat beragama.

Jaringan komunikasi antarumat beragama pernah diteliti Retnowati (2013) yang menunjukkan bahwa jaringan yang dibangun dari bawah (*bottom up*) antara Islam dan Kristen yang dikembangkan oleh pondok pesantren dengan GKJW di Jawa Timur telah berhasil meningkatkan kesadaran pentingnya membangun hubungan antara Islam dan Kristen. Program SIKI (Studi Intensif Kristen-Islam) menjadi arena pembelajaran memahami agama-agama lain dan membangun 'jembatan' komunikasi antarumat beragama. Penelitian Fitri (2009) tentang pola komunikasi antarbudaya

dalam menciptakan kerukunan hidup bergama diperoleh kesimpulan bahwa pembauran antar etnis meningkatkan intensitas komunikasi antar budaya yang berkualitas dan membawa hubungan sosial ke dalam bentuk yang lebih dalam dan positif. Penelitian Jati (2004) mengenai fungsi kearifan lokal sebagai resolusi konflik anarkisme agama di Maluku menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam masyarakat memiliki potensi kuat dalam merajut kembali kohesivitas masyarakat dalam proses rekonsialisasi.

Ketiga penelitian tersebut menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian Insani dan Wuryanto (2012) pada Dekanat FPMIPA UNY agak berbeda, mereka menggunakan metode analisis jejaring sosial yang dikembangkan Ridle dan Hanneman, 2005, dengan lingkup kajian mikro sebagaimana yang dilakukan oleh Retnowati (2013). Temuan kajian tersebut adalah peran *information brooker* yang terbukti mampu mengisi lubang struktural dalam jejaring sosial dengan menjembatani dua jaringan yang tidak terkait langsung. Posisinya sangat penting atas kelancaran arus informasi, jika peran ini dihilangkan maka dinamika organisasi akan sangat terganggu.

Tulisan ini berusaha mengetahui pola komunikasi antartokoh lintas agama dalam organisasi FKUB yang dibentuk dengan kebijakan *topdown*, artinya individu-individu dalam kelompok tersebut awalnya tidak berasosiasi secara sukarela namun berdasar kepentingan penguasa daerah. Tokoh-tokoh agama Islam sebagai representasi kelompok mayoritas memiliki kecenderungan menghegemoni representasi kelompok minoritas. Kondisi ini tentu lebih sulit dalam membangun komunikasi antaragama jika dibandingkan dengan yang pembentukannya berdasar inisiatif mereka. Lingkup kajian penelitian ini lebih bersifat mikro, yakni perilaku antaraktor dalam menjalin komunikasi antartokoh agama dengan teknik analisis kualitatif.

Selain FKUB, di Gresik juga ada jaringan lintas agama Formalina (Forum Masyarakat Lintas Agama). Fenomena ini sangat menarik untuk

ditemukan penjelasannya, mengapa dari beberapa tokoh agama tersebut membuat jaringan baru di luar FKUB. Adakah hal-hal penting yang harus dilakukan sehingga jaringan antartokoh lintas agama yang bersifat informal ini dibentuk.

Paparan di atas menjadi dasar bahwa penting untuk melakukan kajian mengapa jaringan komunikasi antartokoh lintas agama berfungsi baik dan bagaimana sistem jaringan komunikasi itu dibangun. Kedua, berusaha mengetahui kearifan lokal apa saja yang mendasari para tokoh agama itu dalam membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama lainnya. Informasi mengenai hal tersebut penting untuk diketahui bahwa praktik pengalaman baik para tokoh lintas agama dalam jaringan tersebut bisa menjadi pelajaran (*lesson learn*) untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang multikultur dan memiliki pluralitas keagamaan.

Jaringan (*network*) antartokoh lintas agama penting diperkuat dalam konteks membangun komunikasi antarbudaya/lintas agama. Penguatan jaringan antartokoh lintas agama merupakan sara melaksanakan salah satu fungsi agama, karena selain fungsi edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, dan transformatif, juga ada fungsi pemupukan persaudaraan (Liliweri, 2001:259).

Jaringan sosial menurut Coleman (1988), Putnam (1993), dan Fukuyama (1995) merupakan salah satu dimensi dari modal sosial (*social capital*), selain rasa saling percaya (*trust*) dan berkembangnya nilai-nilai/norma sosial (*values/norm*) (Salman, 2012: 155). Teori jaringan menurut Rosenthal, dkk. (dalam Ritzer, 2011: 747) memiliki lima prinsip, 1) ikatan-ikatan di kalangan aktor biasanya simetris, baik di dalam isi maupun intensitas, dan para aktor saling menyuplai satu sama lain dengan hal-hal yang berbeda; 2) ikatan-ikatan antarindividu harus dianalisis di dalam konteks struktur jaringan yang lebih besar; 3) penyusunan ikatan sosial menyebabkan berbagai jenis jaringan tidak acak; 4) eksistensi kelompok-kelompok menghasilkan fakta ada kemungkinan pertautan lintas di antara kelompok maupun individu; 5) ada ikatan asimetrik antarunsur

dalam suatu sistem sehingga sumber daya didistribusikan secara berbeda.

Jaringan sosial tentunya memiliki daya kohesi yang menyebabkan anggota dalam jaringan itu lebih intensif dalam menjalin hubungan. Kohesi sosial menurut Mizruchi (dalam Ritzer, 2011: 747) bisa dilihat dari sudut subyektif dan obyektif. Ia cenderung setuju dengan pandangan obyektif dimana solidaritas dapat dipandang sebagai suatu proses obyektif yang dapat diamati yang bebas dari sentimen-sentimen individu. Kesamaan struktural lebih memainkan peran yang kuat sebagai kohesi di dalam menjelaskan kemiripan perilaku. Para aktor yang setara secara struktural adalah orang-orang yang mempunyai hubungan identik dengan aktor-aktor lain di dalam struktur sosial. Tokoh-tokoh berbagai agama dalam FKUB merupakan aktor yang memiliki posisi setara, mereka merupakan wakil dari agama masing-masing.

Ronald Burt (dalam Ritzer, 2011: 747) mengembangkan teori jaringan dalam perspektif struktural dengan asumsi bahwa seorang aktor mengevaluasi manfaat tindakan alternatif salah satunya berkenaan dengan kondisi orang lain. Premis mayornya adalah para aktor bertujuan di bawah paksaan struktur sosial. Tindakan-tindakan yang diambil para aktor adalah suatu fungsi gabungan proses mengejar kepentingan mereka sampai batas kemampuannya ketika kepentingan dan kemampuan itu dipolakan oleh struktur sosial. Sehingga, tindakannya akan memodifikasi struktur sosial itu sendiri. Proses modifikasi itu bisa berpotensi menciptakan pembatas-pembatas baru yang dihadapi oleh para aktor di dalam struktur.

Di sini peran aktor yang bisa menyaring informasi dari para aktor dengan latar belakang agama yang berbeda sangat penting.¹ Jaringan sosial akan berfungsi dengan baik dan terjaganya hubungan dengan baik jika ada aktor yang berfungsi sebagai penyaring informasi dalam komunikasi organisasi yang disebut *gate keeper*. Individu yang berperan sebagai *gate keeper* akan mengontrol

arus informasi di antara anggota organisasi. Posisi *gate keeper* bukanlah aktor pemimpin dalam struktur organisasi, tetapi dia memiliki hubungan dengan berbagai aktor lain dalam jaringan karena bisa diterima berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang saling berseberangan. (Muhammad, 2009: 102).

Kajian teori dan konsep di atas mengerucut pada fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini. Hubungan dalam sebuah jaringan antar tokoh lintas agama idealnya dilandasi dalam prinsip kesetaraan (*equality*) akan meningkatkan daya kohesi dalam jaringan tersebut. Ketika kepentingan dan kemampuan telah dipolakan secara paksa oleh struktur yang dibuat dengan kebijakan *top down*, maka aktor hanya akan mengejar kepentingan itu sampai pada batas kemampuannya di bawah aturan/norma dalam struktur sosial yang sifatnya memaksa itu. Sehingga peran *gate keeper* sangat penting untuk bisa meretas hambatan komunikasi antartokoh lintas agama dan mereduksi potensi konflik karena kekeliruan memahami nilai dan norma dari agama lain. Sangat diperlukan kreativitas seorang aktor dalam membuat terobosan hingga muncul nilai-nilai kebersamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 dengan subyek penelitiannya FKUB Kabupaten Gresik dan Forum Masyarakat Lintas Agama (FORMALINA) Gresik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pola komunikasi dalam jaringan antartokoh lintas agama di FKUB, serta hubungan komunikasi antara FKUB dengan FORMALINA. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitiannya. Pemetaan jaringan dan penentuan informan kunci diperoleh dari kegiatan FGD, baik dengan penyuluh agama dan tokoh agama dalam FKUB maupun FORMALINA.

Pola hubungan antar tokoh, kepentingan yang diperjuangkan dan pola komunikasi dalam praktik pertukaran, motif-motif yang ada di balik hubung-

¹ Ada enam peran utama dalam jaringan komunikasi organisasi, yaitu: *opinion leader*, *gate keepers*, *cosmopolites*, *bridge*, *liaison*, dan *isolate*. (Muhammad, 2009: 103).

an yang nampak, serta nilai-nilai yang mendasari diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa tokoh agama dalam FKUB maupun FORMALINA. Data mengenai kondisi sosial keagamaan masyarakat Gresik diperoleh dari BPS Gresik. Struktur keanggotaan FKUB dan Formalina, serta dokumen-dokumen lainnya diperoleh dari pengurus FKUB dan FORMALINA. Kesahihan data dilakukan mengikuti Bungin (2007: 264), yaitu diuji dengan triangulasi data dan melakukan pertemuan ulang dengan informan kunci untuk memperdalam dan meyakinkan peneliti atas informasi yang diterima.

Analisis data merujuk pada pola analisis studi kasus Robert K Yin, 1996 (dalam Bungin, 2012: 29) dengan mengkaitkan data yang diperoleh dan melihat kesesuaian data dengan jenis-jenis peran dalam jaringan komunikasi organisasi. Nilai-nilai yang mendasari tindakan para aktor tersebut berusaha dieksplorasi dan diinterpretasikan sehingga ditemukan makna atas tindakan para aktor dalam jaringan antartokoh lintas agama di Gresik. Pada tahap akhir analisis data, penulis berusaha memberikan penjelasan yang logis atas fenomena interaksi antartokoh lintas agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Gresik

Masyarakat Gresik memiliki sejarah panjang sebagai sebuah komunitas Jawa pesisiran. Pada tanggal 9 Maret 2014 merupakan ulang tahun Gresik ke 527. Berdirinya Gresik disepakati sejak penobatan Sunan Gresik menjadi Prabu Satmata tanggal 12 Maulid (Rabiul Awal) 894 H, bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1487 M. Sebelum tahun itu, Gresik sudah menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara. Islam pun tercatat sudah ada di Gresik sejak tahun 495 H atau 1102 M sebagaimana tertera pada prasasti batu nisan Fatimah binti Maemun di Leran, Gresik. Sepeninggal Sunan Giri, Gresik tetap menjadi basis pengembangan Islam di pesisiran Jawa Timur, sehingga sampai sekarang mayoritas penduduknya beragama Islam (Mustakim, 2007).

Penduduk Kabupaten Gresik berjumlah 1.156.233 jiwa, dengan komposisi 98,62% Islam, 0,82% Kristen, 0,34% Katholik, 0,18% Hindu, dan 0,04% Budha. Persebaran tempat ibadah umat Islam merata di seluruh wilayah Gresik dengan jumlah 1.104 masjid dan 2.701 mushalla. Tempat ibadah non Islam terdiri dari 10 unit gereja Kristen, 3 unit gereja Katholik, 5 unit pura, dan 1 unit kelenteng (BPS Gresik, 2013). Kelenteng di Gresik menurut Sugito (anggota FKUB utusan agama Budha) saat ini masih dipakai bersama antara umat Budha, Khonghucu, dan Thao.

Informasi dari para Penyuluh Agama (FGD, 12 Pebruari 2014) menyebutkan bahwa umat non Islam tersebut tersebar di Gresik kota dan Gresik selatan, terutama wilayah yang berbatasan dengan kota Surabaya. Umat Islam di bagian utara mayoritas penganut Islam tradisional (warga NU). Kaum Islam moderat mayoritas berada di Gresik kota dan bagian selatan wilayah Gresik, terutama pada daerah perumahan.

Potensi konflik antarumat beragama di Gresik pernah ada meskipun eskalasinya masih kecil. Tercatat ada 4 kasus terkait pendirian gereja dan 1 kasus rekonstruksi pura. Potensi konflik intern umat Islam di Gresik juga perlu diwaspadai, karena pernah terjadi kasus terkait dengan keberadaan kelompok aliran Salafi Wahabi, Syiah, dan MTA (Pokja Penyuluh Agama Gresik, FGD 12 Maret 2014; Sekretaris FKUB, wawancara 11 Februari dan 10 Maret 2014; Ketua FKUB, wawancara 20 Maret 2014)

Dinamika FKUB Gresik

Jaringan komunikasi tokoh lintas agama di Gresik sudah mulai dirintis tahun 2005, sebelum ada PBM Nomor 8/9 Tahun 2006. Ketika itu, Gresik bersama Banyuwangi dan beberapa daerah lain digunakan untuk riset aksi (*action riset*) membangun kerukunan umat beragama dengan pembentukan jaringan antartokoh lintas agama oleh Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Jaringan tersebut dibentuk masyarakat yang dimotori oleh

seorang tokoh agama Islam, ketuanya anggota DPRD Gresik waktu itu.

Setelah PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terbit dan mulai disosialisasikan, Pemkab Gresik pun menindaklanjuti dengan menerbitkan SK Bupati Gresik Nomor 065/658/HK/403.14/2007 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB pada tanggal 24 April 2007. Jumlah pengurusnya ada 17 orang dengan perwakilan keanggotaan secara proporsional sesuai peraturan bersama menteri tersebut, 13 muslim, 1 Budha, 1 Hindu, 1 Katholik, dan 1 Kristen. Proporsi itu berdasarkan Pasal 10 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan dijelaskan secara detail dalam tanya jawab Bab III nomor 10. Pada tanya jawab (semacam penjelasan atas pasal-pasal) disebutkan bahwa setiap seorang keanggotaan FKUB kabupaten/kota mewakili 5,88% umat agamanya.²

Menurut informan 1, sebagian besar nama tokoh agama yang telah ikut membidani lahirnya jaringan lintas agama tidak tercantum pada lampiran SK tentang pengurus FKUB. Nama-nama baru yang ditunjuk oleh pihak pemerintah daerah lebih banyak muncul. Dampak dari kebijakan *top down* ini kinerja FKUB tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang diungkapkan informan 1 (tokoh Islam pengurus FKUB) sebagai berikut.

Periode pertama kepengurusan FKUB (2007-2010) lebih banyak diisi orang-orang dekat kekuasaan. Itu semacam balas budi kepada pendukung waktu pilkada. Kegiatan FKUB masih banyak diisi dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kerukunan umat beragama³. Kinerja FKUB belum menampakkan hasil. Hubungan antartokoh lintas agama belum terjalin dengan baik, masing-masing masih bertahan pada kepentingan kelompoknya. (Wawancara 9 dan 15 Maret 2014).

Hubungan antar personal dalam jaringan lintas agama itu masih dalam kondisi kebuntuan dan tidak ada figur yang bisa membangun rasa kebersamaan antartokoh lintas agama. Pernyataan itu sesuai dengan pernyataan informan 3 (anggota FKUB, tokoh Kristen), dan informan 9 (aktivis muslimah, pengurus FKUB di periode pertama dan ketiga) yang mengatakan sebagai berikut.

Saya sejak awal tiga periode di FKUB, sejak awal berdirinya di Gresik. Awalnya ya kikuk, sulit komunikasi karena memang belum saling mengenal. Pemrakarsa awal jaringan lintas agama, sebelum FKUB yang diformalkan Bupati, tidak masuk kepengurusan. (Informan 3, wawancara 19 Maret 2014). Periode awal pertama FKUB tidak seaktif sekarang, hubungan antar tokoh kurang 'cair'. Mungkin dulu belum ada pak MT, saya sudah usulkan untuk memasukkan Pak MT karena beliau yang dulu berinisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh sebelum ada kepengurusan FKUB bentukan dari Pemda. (Informan 9, wawancara 15 Maret 2014).

Pernyataan informan 3 dan 9 itu menunjukkan personel dalam FKUB yang ditunjuk Bupati belum sesuai dengan keinginan mereka. Ada tokoh-tokoh agama yang mereka kehendaki yang bisa meretas kebekuan komunikasi lintas agama, namun karena pihak Pemda memiliki kepentingan sendiri maka sistem dalam jaringan itu belum memberikan sumbangan positif. Hal itu dikuatkan oleh penuturan informan 4 (tokoh Katholik) sebagai berikut.

FKUB yang diformalkan oleh pemerintah sifatnya *top down*, sementara kami membentuk forum lintas agama itu ide dasarnya berdasarkan keinginan dari bawah dengan semangat paguyuban, sukarela dan memang benar-benar keinginan dari masing-masing kami. Pihak pemerintah mulai ikut masuk dan menempatkan orang-orangnya lalu mendikte, harusnya begini, begitu. Ya sudah. ... Jika awalnya

² Tanya jawab PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini merupakan hasil kesepakatan Tim Sosialisasi PBM Pusat yang beranggotakan enam belas orang, masing-masing dua orang dari Ditjen Kesbangpol Depdagri, Badan Litbang dan Diklat Depag, MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN. Tim ini dibentuk setelah setahun pelaksanaan peraturan tersebut, di mana dari hasil evaluasi pelaksanaannya masih banyak daerah yang belum mengimplementasikan karena adanya penafsiran yang berbeda atas pasal-pasal di peraturan bersama itu.

³ Tugas FKUB kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat (2) adalah: a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

pola hubungan dari hati ke hati, kemudian diatur dengan pola proporsional dan dimasukkannya unsur-unsur fanatisme itu, akhirnya berubah menjadi diskusi yang berat-berat, lalu menjadi pola hubungan 'kejelasan'. Padahal kami berdiskusi tidak untuk berdebat, hanya mengembangkan kebaikan bersama (Wawancara 11 Maret 2014).

Pernyataan informan 4 itu memiliki makna bahwa ada ungkapan putus asa, ada keterpaksaan untuk menerima realitas ketika komunikasi para tokoh lintas agama diatur pemerintah. Masyarakat diyakini memiliki caranya sendiri untuk membuat keseimbangan dalam pertukaran informasi antar agama. Kebijakan *top down* dari pemerintah dianggap telah membuat batasan-batasan yang menghambat komunikasi antar tokoh agama. Sebagai wakil kelompok minoritas sebetulnya ada nilai yang ingin diperjuangkan untuk membangun kerukunan melalui prakti-praktik kebaikan, bukan hanya wacana. Ungkapan itu dilandasi pengalaman informan 4 di daerah lain yang telah berhasil memprakarsai terwujudnya jaringan tokoh-tokoh lintas agama tanpa campur tangan Pemda. Jaringan tersebut ternyata lebih fungsional karena mampu meredam berbagai potensi konflik karena telah terbangun komitmen bersama bahwa setiap tokoh agama akan menjaga keharmonisan dan menahan diri ketika ada ketidakcocokan pendapat.

Ada kebuntuan komunikasi dan masing-masing aktor masih menjaga jarak, karena tindakan-tindakan aktor dalam jaringan itu telah dipolakan oleh struktur yang dibuat pemerintah. Tiap-tiap aktor masih berada pada posisi *in group feeling* dan *out group feeling*, atau memandang tokoh agama lain sebagai *the others of group*. Hubungan seperti itu tentunya tidak kondusif dalam membangun ruang dialog yang intensif antartokoh agama, tidak akan bisa menghilangkan kecurigaan dan pandangan *stereotype* pada pihak lain.

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ketika diimplementasikan direspon oleh umat minoritas sebagai bentuk hegemoni pemerintah terhadap umat beragama. Padahal peraturan tersebut merupakan hasil musyawarah para tokoh agama di level pusat yang kemudian draft peraturan

itu diotorisasi oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sebetulnya bukan umat Islam saja yang akan mendominasi FKUB, ketika penduduk suatu daerah mayoritas umat non Islam, maka yang mendominasi keanggotaan FKUB adalah non muslim. Peraturan ini memang memunculkan hegemoni kelompok mayoritas atas kelompok minoritas pada daerah-daerah. Sebagaimana dijelaskan Patria dan Arief (2009:121) yang mengikuti pendapat Gramsci bahwa hegemoni merupakan rantai 'kemenangan' yang diperoleh melalui mekanisme konsensus terhadap kelas sosial/kelompok lain. Dalam hal keanggotaan FKUB maka kelompok mayoritas akan mendominasi kelompok minoritas. Kemudian, melalui institusi yang disepakati inilah secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat.

Proses penentuan personel dalam FKUB ini yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Pasal 8 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat, sedangkan pemerintah daerah memfasilitasi. Kriteria dan mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat tidak dijelaskan lebih lanjut, demikian dalam Tanya Jawab PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 juga tidak ada penjelasan lebih lanjut. Proses penentuan personel Dewan Penasehat FKUB justru lebih detail dan jelas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 11. Hal inilah yang menyebabkan Bupati Gresik dalam pembentukan keanggotaan FKUB periode pertama kurang memperhatikan eksistensi forum komunikasi yang telah dibentuk masyarakat.

Tugas Dewan Penasehat FKUB dalam Pasal 11 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terasa ambigu, karena harus membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Lembaga ini berarti merupakan penasehat kepala daerah. Terasa ada tumpah tindih antara peran FKUB dengan Dewan Penasehat FKUB. Sehingga akan lebih baik jika Dewan Penasehat FKUB disebut Dewan Penasehat KUB, karena yang dibantu adalah kepala daerah, bukan FKUB. Sementara itu, kepada FKUB

tugasnya adalah memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemda dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. FKUB adalah lembaga otonom yang bertugas memberi rekomendasi kepada kepala daerah. Tugas penasehat Dewan Penasehat FKUB kepada FKUB juga tidak tertuang secara eksplisit, sebagaimana dijelaskan dalam Tanya Jawab PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab III nomor 18 bahwa: “FKUB dan Dewan Penasehat FKUB adalah dua struktur organisasi yang terpisah namun kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan kemitraan”. Jadi, Dewan Penasehat FKUB akan lebih sesuai jika disebut Dewan Penasehat KUB.

Peran Gate Keeper dalam FKUB dan FORMALINA

Kondisi tersebut berubah pada kepengurusan FKUB periode kedua dan ketiga. Kepengurusan FKUB periode kedua ditetapkan dengan SK Bupati Gresik Nomor 065/142/HK/437.12/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Gresik. Kepengurusan FKUB dirotasi kembali untuk periode ketiga dengan terbitnya SK Bupati Gresik Nomor 065/102/HK/437.12/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Gresik.

Masa kepengurusan FKUB periode kedua mulai ada perubahan personel dan muncul individu yang bisa menjadi jembatan komunikasi antartokoh lintas agama dan menyaring informasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Informasi tersebut diungkapkan beberapa informan anggota FKUB sebagai berikut.

Ya, *alhamdulillah* hubungan antarumat beragama di Gresik baik, tapi bukan karena saya, apalagi ada pengurus yang bekerja baik. Sebagai ketua pengurus FKUB, harus baik-baik mengaturnya, karena ada yang agak keras, ada yang biasa-biasa, ada yang kelihatannya manut saja. Kalau secara umum itu ya Pak MT itu. (Informan 2, w. 20/3/2014). Tentunya ada figur yang bisa mencairkan suasana, seperti caranya pak MT. Sehingga, ketika kita di FKUB sudah tidak berfikir soal *klambine abang*, biru dan lain-lain, kita merasa *sedulur*. Itu terjadi juga ketika

kami mempercakapkan hal-hal yang serius, dia juga bisa membuat semuanya diselesaikan dengan baik. Dia bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang berseberangan. Dia bukan hanya jembatan antar agama, tetapi juga antarkaum dalam intern Islam (Informan 3, w. 19/3/2014). Saya pikir mereka akrab, nggak ada jarak. Bahkan ngomonge *sak enake dewe*, saling ngolok-olok, *guyonan*. ... Pak MT banyak memberi masukan-masukan. Dia lebih banyak *joke*, sehingga susah diterka mau ke mana dia. (Informan 6, w. 15/3/2014). Kalau yang bisa diterima di sana-sini ya pak MT, dengan bahasa yang kadang *saru* tapi itu dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan akhirnya yang serius jadi ringan. (Informan 8, w. 16/3/2014). ... Sekarang setelah ada pak MT suasananya berbeda, lebih komunikatif dan bisa merangkul semua pihak”. (Informan 9, w. 15/3/2014).

Makna dari semua pernyataan itu adalah peran MT dalam menjembatani (*bridge*) antar aktor dalam jaringan itu, dengan gaya bahasa yang bisa diterima berbagai pihak. Keterterimaan dari berbagai pihak atas peran MT itu maka pembatas-pembatas karena perbedaan agama dan paham (dalam intern Islam) bisa menjadi lentur. Intensitas komunikasi antar tokoh sudah semakin baik, sehingga peran FKUB tidak hanya terkait masalah antar agama namun juga terkait intern agama, misalnya masalah MTA dan aliran Salafi-Wahabi. Pihak Pemda pun semakin mengakui bahwa peran FKUB cukup strategis menjaga suasana kondusif di Gresik.

Peran MT sebagai *gate keeper* dalam FKUB dilakukan secara alamiah sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini.

Jadi, pola komunikasi yang saya bangun dengan istilah rapat di atas meja dan di bawah meja. Itu sangat diperlukan dalam menjaga harmoni. Misalnya dalam membahas salafi-wahabi, teman-teman tradisional sudah saya bekal tentang peta paham keagamaan yang berdekatan dengan salafi-wahabi. Hal ini untuk mengurangi pertentangan antara kelompok Islam tradisional dengan modernis. Saya harus menjaga ritme kapan harus saya sampaikan ke Kyai Afif (NU-penl.) dan kapan ke Kyai In’am (Muhammadiyah-penl.). Informasi yang saya sampaikan selalu saya saring, agar mereka berdua tidak berdebat langsung. Kalau dibiarkan, bisa tarung sendiri nanti. ... Kalau untuk orang yang bertugas menyeleksi informasi itu saat ini masih bertumpu pada saya. Saya sadar untuk

sebuah organisasi, kondisi ini memang tidak sehat. (MT, wawancara 16 Maret 2014).

Pola komunikasi dengan informasi yang tersaring itu dianggap sebagai cara untuk mengeliminir terjadinya friksi antar tokoh. Dia menyadari bahwa ada resiko yang harus diterima dalam posisi sebagai *gate keeper*, adanya kecurigaan dari sesama tokoh Islam merupakan sebuah konsekuensinya. Ketika isu berkembangnya salafi-wahabi dan MTA di Gresik, MT sangat berhati-hati memberikan informasi kepada ketua FKUB yang berbasis NU, demikian juga yang dilakukan kepada wakil ketua yang berasal dari Muhammadiyah, kedua belah pihak harus saling difahami posisinya masing-masing.

Saya ketika menyampaikan ucapan sambutan di aula dalam forum lintas agama, saya ya tidak bicara ayat, tetapi bicara filsafat, humanisme dan hal-hal lain. Saya ini tidak keluar dari aturan *koq*, tetap pada jalur Islam. Mereka yang keras kemudian saya kenalkan dengan paham multikultural kemudian hati mereka menjadi lembut, iya. Saya biasanya bilang kepada teman muslim begini: “*sampeyan ngamuk gerejo onok, sampeyan gak ngamuk gerejo yo onok. Luwih apik sampeyan oleh manfaat teko iku*”. Untuk apa mulut kita berbusa-busa, *power* dikeluarkan, *toh* kita tidak bisa menyingkirkan mereka, karena negara melindungi mereka (MT, wawancara 16 Maret 2014).

Pernyataan MT menunjukkan bahwa dia memiliki kapasitas dan kemauan menyebarkan paham multikulturalisme dan kebangsaan bagi anggota FKUB lainnya. Setiap individu harus mau mengakui eksistensi orang lain, karena hukum positif telah melindungi setiap warga negara.

Data ini menunjukkan bahwa MT berhasil memerankan dirinya sebagai *gate keeper* sebagaimana Muhammad (2009: 103) dan Abercrombie, dkk. (2010: 228) sampaikan bahwa seorang *gate keeper* harus mampu menyaring informasi atas kelayakan informasi yang perlu disampaikan kepada pihak terkait dan dia mampu memanfaatkan perannya dalam memutuskan apakah suatu informasi penting atau tidak, beresiko merusak hubungan antar tokoh atau tidak.

Ketika dia merasa ada yang belum terwakili dalam jaringan antartokoh agama di FKUB, maka

MT semakin intensif menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama yang tidak masuk dalam FKUB tersebut. Untuk mewadahi tokoh-tokoh agama yang tidak masuk FKUB, serta memperluas jaringan antartokoh lintas agama maka dibentuk lembaga baru yang bernama Forum Masyarakat Lintas Agama (FORMALINA). MT lebih lanjut menuturkan sebagai berikut.

Pada awalnya saya tidak di dalam FORMALINA karena sudah di FKUB, namun tokoh-tokoh non muslim di FORMALINA tidak mau. FORMALINA itu tujuan utamanya untuk membina dan membangun komunikasi lintas agama bagi generasi muda. Akhirnya, pada tahun 2012 FORMALINA saya bentuk bersama tokoh lain dengan struktur seperti organisasi NU (MT, wawancara 16 Maret 2014).

Informasi dari MT tersebut sesuai dengan informasi dari informan 4 dan 5. Struktur FORMALINA yang dibentuk cukup gemuk, ada 11 orang tokoh agama dalam Dewan Pembina, terdiri 2 Islam, 3 Katholik, 5 Kristen, 1 Hindu dan seorang Sekretaris Dewan Pembina. Bupati diposisikan sebagai Pelindung, sedangkan Penasehatnya adalah Wakil Bupati Gresik, Dandim Gresik, dan Kapolres Gresik. Pengurus Harian adalah generasi muda lintas agama, terdiri dari ketua 1 orang, wakil ketua 5 orang, seorang sekretaris dibantu empat orang wakil sekretaris, dan seorang bendahara. Departemen yang ada meliputi pendidikan dan pengkaderan, humas, lingkungan dan sosial, kerukunan dan keharmonisan, serta pengembangan jaringan.

FORMALINA menekankan pada terbentuknya jalinan komunikasi lintas agama pada generasi muda. Inisiator FORMALINA menginginkan generasi muda memahami bahwa tiap-tiap daerah memiliki masyarakat dengan karakteristik keagamaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, generasi muda perlu kritis dan cepat tanggap pada kondisi multikultur itu

Pembentukan organisasi Formalina dengan struktur kepengurusan itu kurang disetujui sebagian tokoh, sebagaimana dikatakan seorang tokoh agama Katholik. “*Ketika pemerintah (Pemda) mulai masuk dan mengatur di sana-*

sini lalu menempatkan orang-orangnya, maka semangat paguyuban ini mulai berubah” (Informan 4, wawancara 11 Maret 2014). Dia juga merasa kurang setuju terhadap masuknya orang-orang pemerintahan dalam FKUB. Para pejabat dan jajaran Muspida Gresik sebagai penasehat FKUB maupun FORMALINA dirasakan telah mendistorsi semangat paguyuban yang murni untuk menyebarkan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan atas dasar kebaikan bersama. Hal itu membuat khawatir para tokoh lintas agama bahwa FKUB dan FORMALINA akan ditumpangi dengan agenda-agenda politik demi kepentingan pragmatisme pihak tertentu.

Meski demikian, forum tersebut menurut MT (wawancara 16 Maret 2014) masih berfungsi sebagai arena dialog tentang multikultural, kebangsaan, kerukunan antarumat beragama dan isu-isu lain bagi tokoh-tokoh lintas agama. Dialog ini juga diikuti para generasi muda dari FORMALINA. Pada forum ini juga digunakan untuk menyampaikan hal-hal baru terkait keputusan di FKUB, kebijakan pemerintah pusat atau daerah mengenai hubungan antarumat beragama maupun peraturan lain. Di sini dia memerankan diri sebagai *bridge*, menjembatani tersampainya pesan dari FKUB ke FORMALINA. Pandangan *stereotype* pada pihak lain, kecurigaan, dan faktor penghambat lain yang menghambat proses hubungan/relasi sedikit demi sedikit mulai mencair, dan hubungan antaraktor dalam jaringan FKUB dan Formalina semakin menunjukkan.

Hubungan FKUB dengan FORMALINA banyak diinisiasi oleh MT. Terbukti MT sebagai aktor dengan peran *gate keeper* dalam FKUB juga mampu memerankan dirinya sebagai *bridge* atau *liaison*⁴, yaitu orang yang berperan sebagai jembatan sekaligus pengantara jaringan antara FKUB dengan FORMALINA. Hubungan antara

tokoh agama yang di FKUB dan di FORMALINA juga dapat terjalin dengan baik. Ketika ada dialog yang diselenggarakan oleh FKUB, tokoh agama di FORMALINA juga selalu diundang. Acara studi banding ke beberapa daerah juga mengajak beberapa tokoh agama yang ada di FORMALINA. Jadi, keberadaan MT ini tidak hanya mampu membangun komunikasi dalam intern FKUB, tetapi juga mampu membangun jaringan antartokoh agama lebih luas lagi di luar FKUB.

Tokoh-tokoh agama di FKUB dan FORMALINA sangat memperhitungkan keberadaan MT, selain peran yang dilakukan juga kapasitas individunya yang memadai. Dia berlatar belakang sebagai warga NU yang kuat, sebagai salah satu pimpinan NU Gresik, pendidikan formalnya S-3, pengajar di lembaga kediklatan dan berpengalaman sebagai penyuluh agama. Dengan posisi dan kapasitas ini memudahkannya untuk mengembangkan jaringan dengan berbagai organisasi atau kelompok lain.

Hal tersebut mirip dengan hasil studi Schwarth yang dikutip Goldhaber, 1986 (dalam Muhammad, 2009: 105) bahwa individu yang berperan sebagai *bridge/liaison* memiliki posisi atau status yang relatif lebih baik dalam organisasi dan merupakan wakil yang kuat dalam struktur pimpinan. Individu dengan tipe *bridge/liaison* ini terlibat lebih banyak dalam aktivitas komite dari pada anggota organisasi lainnya.

Proses terbentuknya jaringan tokoh-tokoh lintas agama di luar FKUB ini bisa dipahami dengan teori jaringan Ronald Burt (dalam Ritzer, 2011: 747) sebagai suatu tindakan alternatif yang berkenaan dengan kondisi-kondisi struktural. Ketika negara melindungi eksistensi gereja-gereja, maka umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Gresik harus mau menerima kenyataan, karena norma dalam struktur itu mengacu pada hukum positif dalam negara. Umat Islam harus berbagi

⁴ *Bridge* dan *liaison* memiliki peranan yang sama, sebagai pengantara berbagai informasi yang relevan di antara kelompok atau organisasi. Bedanya terletak pada keanggotaan dalam organisasi yang berkaitan. *Bridge* adalah anggota dari organisasi dalam jaringan sosial itu, sedangkan *liaison* tidak menjadi anggota organisasi manapun di antara organisasi-organisasi dalam jaringan sosial itu (Muhammad, 2009: 103). Peran *bridge* dan *liaison* itu menurut Ridle dan Hanneman (dalam Insani dan Wuryanto, 2012) biasanya diisi oleh aktor yang memiliki kapasitas sebagai *information broker*.

ruang publik dengan non muslim, dan yang banyak denominasinya adalah Kristen, sementara Katholik, Hindu, Budha tidak seperti itu. Umat Kristen pun harus bisa menerima realitas sosial ini, meskipun ada beberapa denominasi Kristen di Gresik dan di antara mereka tidak dalam satu struktur, mereka tidak bisa menuntut lebih banyak perwakilan dalam FKUB. Jika realitas sosial sudah seperti itu, maka tinggal bagaimana masing-masing pihak memperoleh manfaat dari pihak lain dalam prinsip keseimbangan (*equality*). Sehingga pembentukan FORMALINA di Gresik ini adalah sebuah tindakan logis sebagai terobosan atas pola struktur dipaksakan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini perlu menjadi catatan bagi pemegang otoritas daerah bahwa dalam merumuskan susunan kepengurusan sebuah lembaga atau organisasi untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Kebijakan *top down* tidak selamanya buruk, namun dalam konteks membangun komunikasi antarbudaya/lintas agama di Indonesia sangat perlu mendengar aspirasi dari bawah dan menampung inisiatif yang berasal dari bawah (*bottom up*).

Kearifan Tokoh Agama Gresik Menjalin Hubungan Lintas Agama

Ada konsep yang sangat menarik dari beragam konsep yang dideskripsikan oleh tokoh-tokoh agama dalam FKUB dan FORMALINA. *Pertama*, adanya konsep *nrimo* dan *ngalah*. Konsep ini jika telah dipahami oleh para tokoh agama sebagai cara efektif mereduksi konflik. Jika dua nilai kearifan ini benar-benar dipakai oleh aktor dalam berinteraksi jaringan antartokoh agama, tidak ada konflik kepentingan antartokoh agama. Jika aktor merasa *nrimo* maka dia akan menahan keinginannya, tidak memaksakan kehendak. Demikian juga jika aktor itu *ngalah* atas proses pertukaran dengan pihak lain, maka tidak akan ada konflik dengan pihak lain. Di sini bukan berarti aktor tidak melakukan perjuangan atas kepentingannya, tetapi dia berusaha melakukan pertukaran dengan pilihan yang dianggap paling rasional. Dalam hal ini Coleman (dalam Ritzer dan

Goodman, 2005: 394) berpendapat bahwa: “*Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka*”.

Konsep-konsep lainnya yang penting untuk dikritisi adalah konsep mencari kesamaan dalam hidup beragama, yaitu *ahlaq*. Konsep ini sangat akan berlaku general karena baik atau buruknya perilaku individu tergantung *ahlaq*-nya, sehingga apapun agamanya jika *ahlaq*-nya baik maka dia akan menyebarkan kebaikan pada sesama. Hal ini di luar konteks apakah sebuah agama benar atau tidak benar, karena agama masih memiliki unsur lain yaitu *aqidah* dan ibadah. Jika *ahlaq*-nya baik maka nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agamanya akan mudah diimplementasikan dalam perilakunya.

Nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran kebaikan dari agama yang dianut individu akan saling melengkapi ketika diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat Gresik yang semakin berkembang menjadi masyarakat multikultur. Konsep-konsep perilaku baik dari kearifan lokal dan ajaran agama ketika dibawa oleh para tokoh agama dalam jaringan tokoh lintas agama secara perlahan akan melebur menjadi nilai-nilai yang dipakai bersama dan akan mempengaruhi pola struktur jaringan. Proses ini menurut Schultz (dalam Wirawan, 2012: 147) disebut tipifikasi, yaitu proses individu mengkonstruksi makna di luar arus utama pengalamannya.

Jika nilai-nilai atau norma (*norm*) kebaikan itu bisa menjadi karakter kelompok dalam suatu struktur jaringan maka akan mendorong terbentuknya rasa saling percaya antar aktor, tidak ada lagi kecurigaan antartokoh lintas agama atau antarkelompok. Dari situ akan terbangun rasa saling percaya (*trust*) untuk memperkuat kohesivitas kelompok. Inilah pentingnya rasa saling percaya dalam membangun *social capital* dalam suatu sistem jaringan sosial kelompok dan masyarakat luas. Pengurus FKUB sebagai *small group* memang tidak serta merta mengubah suatu

sistem tatanan yang lebih besar. Jika *small group* masing-masing daerah mampu mengembangkan *social capital* pada lokal daerahnya, kemudian menjadi contoh untuk daerah lain, maka pada level multi lokal hingga nasional akan teragregasi menjadi sebuah tata nilai hidup beragama dalam masyarakat plural yang penuh dengan kebaikan dalam prinsip *co-existence*.

PENUTUP

Pemda Kabupaten Gresik sangat terbantu oleh rekomendasi FKUB Gresik dalam membangun harmoni antarumat beragama pada masyarakat yang mengalami perubahan komposisi umat beragamanya. Keberadaan jaringan antartokoh lintas agama, FKUB Gresik yang dibentuk dengan kebijakan *top down*, ternyata mampu menjadi jembatan komunikasi antartokoh agama, juga antara umat beragama dengan pemerintah daerah.

Aktor yang menempatkan diri sebagai *gate keeper* berperan sangat penting dalam membangun komunikasi antartokoh lintas agama di FKUB Gresik. Aktor tersebut mampu mengendalikan dan menyaring arus informasi, baik dalam intern organisasi FKUB maupun informasi yang masuk atau keluar dari FKUB. Peran aktor ini mampu mereduksi pesan-pesan yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak integrasi antartokoh agama. Aktor tersebut sekaligus berperan sebagai jembatan (*bridge*) komunikasi antartokoh agama dalam internal FKUB maupun dengan eksternal FKUB, terutama FORMALINA dan ormas keagamaan di Gresik. Organisasi antartokoh lintas agama sebagai jaringan komunikasi antarbudaya memerlukan individu/aktor yang mampu berperan sebagai *gate keeper* dan bisa membangun jembatan komunikasi (*bridge*) dengan pihak-pihak terkait, termasuk jaringan tokoh lintas agama di luar FKUB.

Komunikasi antartokoh lintas agama di Gresik banyak memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka telah membentuk sebuah keluarga. Rasa kekeluargaan antartokoh agama dalam FKUB telah terkonstruksi sebagai karakter kelompok, antara satu dengan

lainnya merasa sebagai saudara. Kedekatan hubungan antar individu dalam FKUB mendorong tumbuhnya rasa saling percaya dan mereduksi kecurigaan antartokoh umat beragama. Hal tersebut ternyata mampu meningkatkan kapasitas modal sosial (*social capital*) dalam membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan kondusif. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial antarumat beragama.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang menginspirasi hingga tersusunya tulisan ini. *Pertama*, kepada para tokoh agama yang tergabung dalam organisasi FKUB Gresik dan FORMALINA yang telah berkenan memberikan informasi dan *lesson learn* dalam membangun harmoni umat beragama berbasis kearifan lokal. *Kedua*, kepada Prof. Dr. Koeswinarno, M.Hum. atas masukannya tentang teori jaringan komunikasi dalam diskusi dengan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, dkk. 2010. *Kamus Sosiologi*. (edisi 5). Diterjemahkan oleh Desi Noviyani, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. 2013. *Gresik Dalam Angka 2013*. Gresik: BPS Kabupaten Gresik.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (edisi kedua)*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Litbang dan Diklat. 2008. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Fitri, Wanda. 2009. *Pluralisme Dan Kerukunan Hidup Beragama: Studi Komunikasi Antarbudaya Terhadap Hubungan Sosial*

- Lintas Agama Di Sumatera Barat*. Dalam prosiding *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)* ke-9. Surakarta, 2 – 5 November 2009. Diperoleh dari <http://dualmode.kemenag.go.id/> diakses 13 Pebruari 2014.
- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT Saadah Cipta Mandiri.
- Insani, Nur dan Waryanto, Nur Hadi. *Penerapan Teori Graf Pada Analisis Jejaring Sosial Dengan Menggunakan Microsoft Nodexl*. Dalam PYTHAGORAS, Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, Volume 7 Nomor 1, Juni 2012, hal. 83 – 99.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*. Dalam Jurnal Walisongo, Volume 21 Nomor 2, November 2013, hal. 393 – 416.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustakim. 2007. *Gresik Dalam Lintasan Lima Zaman: Kajian Sejarah, Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Patria, Nezar dan Arief, Andi. 2009. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnowati. 2013. *Jaringan Sosial Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Dengan Pondok Pesantren Di Malang Jawa Timur*. Dalam Jurnal Analisa Balai Litbang Agama Semarang Volume 20 Nomor 01 Tahun 2013 hal. 37 – 50.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terahir Postmodern (Edisi Kedelapan)*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern, edisi ke-6*. Diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sosiologi Suatu Pengantar (cet.44)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirawan, IB. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group